

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk sebagai modal dasar dan factor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan daerah, memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi, dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Selanjutnya Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik. Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Penduduk memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi dalam pembangunan karena disamping sebagai tujuan dan sasaran pembangunan untuk meningkatkan derajat dan kualitas kehidupannya, juga merupakan pelaku pembangunan yang akan menentukan kualitas dan kapasitas pembangunan itu sendiri. Sehingga penduduk harus menjadi fokus dan landasan utama dalam merumuskan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara kondisi kependudukan saat ini dihadapkan permasalahan yang kompleks, mulai dari permasalahan jumlah, penyebaran, mobilisasi dan kualitas kependudukan. Agar berbagai bentuk kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat secara tepat sasaran, maka diperlukan tersedianya data dan informasi tentang kependudukan yang komprehensif, akurat dan valid serta dapat dianalisis secara mendalam sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan itu sendiri.

## **B. Tujuan Dan Sasaran**

Tujuan studi ini adalah :

- 1) Melakukan kajian tentang upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang lebih tertib, efisien dan komprehensif sebagai bentuk pelayanan pemerintahan yang berkualitas.
- 2) Melakukan identifikasi pola mobilitas/migrasi penduduk guna dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan pengendalian penduduk.
- 3) Melakukan identifikasi pola penyebaran penduduk yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
- 4) Melakukan kajian tentang pola Pengelolaan kependudukan yang efisien dan efektif pada wilayah cepat tumbuh, wilayah berkembang, kawasan strategis (perbatasan), dan kawasan padat.

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

- 1) Tersedianya Rencana Strategi Kependudukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Riau yang diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Wilayah.
- 2) Tersedianya Dokumen Strategi Kependudukan untuk jangka waktu 2012-2012
- 3) Akuratnya landasan perencanaan pembangunan wilayah yang mengacu kepada dokumen strategis bidang Kependudukan.
- 4) Mengefisienkan dan mengefektifkan kebijakan pembangunan wilayah.

### C. Lingkup Kajian/Studi

Kajian akan dilakukan untuk :

- 1) Melakukan evaluasi seluruh kebijakan dalam bidang kependudukan dan Kebijakan pendukung lainnya yang terkait serta terhadap hasil-hasil penelitian kependudukan yang telah dilakukan.
- 2) Melakukan analisis terhadap gambaran tentang kondisi umum kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk melakukan identifikasi permasalahan yang sering muncul dibidang kependudukan baik secara kultural, sosiologis, politis dan ekonomi.
- 3) Prakiraan terhadap trend pertumbuhan penduduk dan faktor faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal yang berdampak penting bagi penduduk Kepulauan Riau.
- 4) Menyusun strategi kebijakan kependudukan tingkat provinsi yang diperlukan guna dijadikan landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara komprehensif, sehingga dengan tepat dapat diantisipasi sesuai dengan kondisi yang berkembang.

#### D. Lokasi Studi/Kajian

Kajian ini dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang terdapat dalam Provinsi Kepulauan Riau . Dengan melihat dinamika perkembangan penduduk dan wilayah, maka kabupaten/kota dibagi dalam beberapa kategori yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam untuk melihat dinamika kependudukan di perkotaan. Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas untuk melihat dinamika kependudukan pada wilayah perbatasan dengan negara tetangga dan provinsi tetangga. Kabupaten Karimun dan Bintan untuk melihat dinamika kependudukan pada wilayah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan strategis yang diarahkan untuk mencapai suatu pengelompokan kawasan fungsional yang memberikan *backward* dan *forward linkages* serta *multiplier effects* bagi daerah di sekitar kawasan tersebut.

#### E. Keluaran Yang Dihasilkan

*Keluaran :*

- 1) Tersedianya informasi dan data yang menggambarkan tentang Situasi Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau.
- 2) Rumusan Strategi tentang pengendalian kependudukan.
- 3) Teridentifikasinya kebutuhan pembangunan pada kawasan perbatasan, perkotaan, dan wilayah Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan melalui pengembangan Kawasan Strategis di Kepulauan Riau.

*Hasil :*

Tersedianya dokumen perencanaan strategis bidang kependudukan yang dapat dijadikan landasan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 - 2020 yang berkelanjutan.

## F. Metodologi

Menggunakan prinsip-prinsip penelitian yang telah umum dilakukan dalam menyusun kebijakan strategis, seperti statistik, *Focus Group Discussion (FGD)* dan analisa berdasarkan faktor *tangible* dan *intangible*. Menggunakan dasar hukum yang ada, analisa kebijakan lokal, pendekatan kultural dan sosial kemasyarakatan sampai dengan ditentukannya kesimpulan kebutuhan, keinginan dan harapan yang realistis, terukur dan dapat tercapai. Melakukan pengamatan terhadap kondisi sarana dan prasarana wilayah di lokasi penelitian, termasuk melakukan analisa terhadap kesiapan layanan kependudukan.

Metode analisis yang digunakan adalah bersifat Kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data diperoleh berupa data primer yang diperoleh melalui hasil FGD yang dilakukan dengan SKPD terkait (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS, Dinas Sosial dan Bappeda) serta dengan TOMA dan LSM tempatan dan Observasi Lapangan dan data sekunder dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, Laporan Kependudukan, dan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang ada.

Untuk melengkapi dan menyempurnakan dari hasil analisis yang telah dituliskan dalam bentuk *Draft Final Report* sebelum dilakukan *Final Report*, maka terlebih dahulu akan dilakukan seminar dengan melibatkan para pihak yang terkait dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pembahasan yang akan dilakukan para nara sumber yang memiliki kompetensi dalam pembahasan hasil kajian ini.